

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan sapi berkembang dan tumbuh dari waktu ke waktu di Kabupaten Pamekasan. Usaha pemeliharaan sapi sudah bukan lagi usaha sampingan, akan tetapi sudah berkembang menjadi usaha bisnis kolumnal yang prospektif. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan dan diimplementasikan, baik secara nasional maupun di tingkat daerah untuk mendukung pengembangan usaha ternak sapi.

Usaha ternak sapi tidak hanya menghasilkan output berupa anakan, daging atau susu, tetapi juga menimbulkan eksternalitas negatif dari limbah yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti kotoran (feses), urine, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Peternakan sapi sering dituding memiliki tingkat mencemari lingkungan yang cukup besar. Agustina Abdullah dkk. (2015) menyatakan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan biaya yang harus dibayar masyarakat dan tidak ada jalan untuk menghindarkannya. Hal ini sesuai yang diterangkan Sarwanto (2004) dalam Perwitasari, dkk. (2017). Karena kegiatan usaha ternak sapi di Indonesia sampai saat ini masih mementingkan produktivitas ternak dan belum mempertimbangkan aspek lingkungan atau dampak kegiatan terhadap lingkungan .

Selain memperoleh keuntungan dalam hal bisnis, usaha peternakan juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kerugian sumberdaya yang hilang. Eksternalitas negatif yang timbul dari pengembangan peternakan sapi bersumber dari kotoran sapi yang dapat mengeluarkan gas metan bahan

pencemar udara, kotoran ternak sebagai sumber mikroorganisme yang mengganggu kesehatan lingkungan dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan manusia (Harlia dkk., 2020).

Kabupaten Pamekasan memiliki kondisi cuaca yang cukup panas dengan tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda memberikan potensi wilayah tata guna lahan yang berbeda terutama sebagai area pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga membagi wilayah pengembangan menjadi 3 (tiga) satuan wilayah pengembangan (SWP) yaitu utara, tengah dan selatan. Sapi Madura berkembang dengan baik di Pulau Madura mempunyai kontribusi yang cukup besar (24%) terhadap kebutuhan supply sapi potong dari Jawa Timur (Wijono dan Setiadi, 2004). Jumlah populasi sapi Madura tahun 2021 berjumlah 129.971 ekor (Pamkasan dalam angka, 2022). Tatang Santanu Adikara (2018) menjelaskan bahwa sapi Madura dapat menghasilkan feces sekitar 10-30 kg per hari sehingga setiap tahun menghasilkan limbah ternak 474.394 - 1.423.182 ton atau rata-rata 948.788 ton.

Limbah ternak sebagai faktor negatif dari usaha peternakan menjadi fenomena yang tidak dapat dihilangkan dengan mudah (Fianda Revina Widyastuti, Purwanto dan Hadiyanto, 2013). Kemampuan sumberdaya dan kemampuan alam untuk mengeliminasi zat pencemar adalah terbatas. Pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan biaya yang harus dibayar masyarakat dan tidak ada jalan untuk menghindarkannya. Peternak dan masyarakat hanya dihadapi oleh dua pilihan untuk membayar ongkos pencemaran yaitu dalam bentuk biaya penanggulangan tercemarnya lingkungan yang menimbulkan kerugian atau mengelola limbah ternak yang memiliki nilai manfaat atau ekonomi.

Pembangunan peternakan berkelanjutan yang memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, air dan sumber daya genetik tanaman dan hewan harus berwawasan lingkungan, artinya pembangunan peternakan yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau menimbulkan pencemaran serta degradasi mutu lingkungan hidup. Dalam satu sisi, limbah ternak dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pembangunan yang dimaksud berarti secara teknis tepat guna sesuai dengan kebutuhan, secara ekonomis layak diusahakan karena menguntungkan, secara sosial dapat diterima oleh hampir semua komponen masyarakat, secara ekologis ramah lingkungan dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem lainnya (Maya Kurnia, 2013).

Pengelolaan limbah ternak di Kabupaten Pamekasan menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi pada awal pengembangannya dan menunjukkan kecenderungan penurunan pengelolaan yang dilakukan peternak dengan berbagai sebab dan alasan. Pengelolaan limbah ternak sapi menjadi penting setelah timbul dampak pada lingkungan. Berbagai kebijakan dan program pemerintah yang terkait pengelolaan limbah ternak sapi, baik secara nasional maupun di tingkat daerah masih belum mampu menggugah petani melaksanakan pengelolaan limbah ternak sapi secara berkelanjutan. Menyadari hal ini, Departemen Pertanian (2014) mengeluarkan peraturan menteri melalui SK Mentan No. 237/1991 dan SK Mentan No. 752/1994, yang menyatakan bahwa usaha peternakan dengan populasi tertentu perlu dilengkapi dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Berlatar belakang hal diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis status keberlanjutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak sapi oleh peternak dalam upaya mencegah dampak

pencemaran lingkungan di Kabupaten Pamekasan.

1.2. Perumusan Masalah

- a. Belum optimalnya keberlanjutan pengelolaan limbah ternak sapi yang dilakukan peternak pada tingkat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pamekasan.
- b. Belum teridentifikasinya faktor kunci penentu pengungkit status keberlanjutan pengelolaan limbah ternak sapi oleh peternak.

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis status indeks penentu keberlanjutan pengelolaan limbah ternak sapi di Kabupaten Pamekasan.
- b. Menganalisis faktor kunci penentu (*leverage factor*) pengungkit status keberlanjutan pengelolaan limbah ternak sapi di Kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Memberikan informasi yang akurat status dan faktor penentu pengelolaan berkelanjutan limbah ternak sapi yang dilakukan peternak dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan di Kabupaten Pamekasan.
- b. Menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan dalam upaya pengendalian pencemaran yang bersumber dari usaha ternak sapi yang lebih prospektif dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.